

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2017, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2021 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2022

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dra. Sitti Hasbia N. Zaenong, M.Si

NIP. 19650824 199103 2 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 31 Januari 2022

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dra. Sitti Hasbia N. Zaenong, M.Si

NIP. 19650824 199103 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LEMBAR MUKA	x
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. INFORMASI UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.1 Pendahuluan	5
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.3 Visi dan Misi	7
2.4 Tujuan dan Sasaran	8
2.5 Strategi	9
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	10
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	10
3.1.1 Belanja	10
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	15
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	16
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	28
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	32
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	33

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP.....	33
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	33
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	35
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	35
5.1.1. Pendapatan-LRA	35
5.1.2. Belanja.....	35
5.1.2.1 Belanja Operasi	36
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	37
5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa	40
5.1.2.2 Belanja Modal	45
5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	45
5.1.2.2.1 Belanja Modal Bangunan Gedung.....	46
5.1.3. Surplus/Defisit LRA	47
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	47
5.2.1. Aset.....	47
5.2.1.1 Aset Lancar	48
5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	49
5.2.1.1.3 Persediaan.....	50
5.2.1.2 Aset Tetap.....	51
5.2.1.2.1 Tanah	52
5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin	52
5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan	53
5.2.1.2.4 Jalan ,Jaringan Irigasi	54
5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya.....	54
5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan	54
5.2.1.3 Aset Lainnya.....	55
5.2.2. Kewajiban.....	56
5.2.3. Ekuitas	56
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	57
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	57
5.3.2. Beban.....	58
5.3.2.1 Beban Operasi	58
5.3.2.1.1 Beban Pegawai	59
5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa.....	60
5.3.2.1.3 Beban Lain-lain.....	62
5.3.2.1.4 Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	63
5.3.2.1.5 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan.....	63
5.3.2.1.6 Beban Penyusutan Jalan , jaringan dan Irigasi...	63
5.3.2.1.7 Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	63
5.3.2.1.8 Beban Penyusutan Aset lainnya	64
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	64

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	64
5.4.1. Ekuitas Awal	65
5.4.2. Surplus/Defisit LO.....	65
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	65
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	66
VI. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	67
6.1 Analisis Vertikal.....	67
6.1.1. Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	67
6.1.2. Analisis Vertikal dalam Neraca.....	67
6.1.3. Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional.....	68
6.1.4. Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas	69
6.2 Analisis Horizontal.....	69
6.2.1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.....	70
6.2.2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca	70
6.2.3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.....	71
VII.PENUTUP	73
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	10
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah	11
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap	22
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset Tetap	24
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021	35
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	37
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	38
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	40
Tabel 5.5	Komposisi Belanja Pakai Habis	42
Tabel 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa Kantor	43
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021	46
Tabel 5.8	Rinciaan Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	48
Tabel 5.9	Rincian Aset Lancar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021	49
Tabel 5.10	Rincian Persediaan Akhir Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan 2020	50

Tabel 5.11 Rincian Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021	51
Tabel 5.12 Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 dan 2020.....	52
Tabel 5.13 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2021	53
Tabel 5.14 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	55
Tabel 5.15 Nilai Buku Aset Lainnya Per 31 Desember 2021.....	56
Tabel 5.16 Rincian Laporan Ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021	57
Tabel 5.17 Rincian Beban Operasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	58
Tabel 5.18 Rincian Beban Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Tengah Tahun 2021	59
Tabel 5.19 Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	60
Tabel 5.20 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan 2020	65
Tabel 5.21 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	36
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Kelompok Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020.....	37
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021	38
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Anggaran Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan	39
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa.....	41
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa	43
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Tahun 2021.....	42
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021	39
Gambar 5.9	Komposisi Aset Per 31 Desember 2021	48

DAFTAR LEMBAR MUKA

- A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- B. NERACA**
- C. LAPORAN OPERASIONAL (LO)**
- D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**
- E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengahserta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Analisis Laporan Keuangan

Bab VI Penutup

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapann SAP Akrual pada pemerintah Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sesuai Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 dan secara operasional mulai melaksanakan fungsi dan tugas pada awal tahun 2017

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagai OPD yang baru terbentuk berupaya untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut telah diupayakan beberapa pembenahan organisasi dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu pelaku Sub sistem dari sistem pemerintahan daerah, untuk memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hal tersebut didukung Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang merupakan urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Konkuren) yang diharapkan dapat mewujudkan dan mengoptimalkan penanganan permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang terdiri dari masalah angka fertilitas penduduk, pemakaian kontrasepsi, dan masalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera. Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban amanat undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana di jelaskan bahwa Keluarga Berencana adalah Upaya mengatur Kelahiran Anak, Jarak dan Usia Ideal Melahirkan, Mengatur Kehamilan melalui Promosi, Perlindungan dan Bantuan sesuai dengan hak Reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas .proporsi antara Jumlah Peserta KB Aktif terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2.2 TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja tentang struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan untuk menjalankan tugas tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
2. Penetapan rencana strategi dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas :
2. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan umum
3. Bidang Pengendalian Penduduk, advokasi dan KIE, membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan ; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
4. Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga membawahi
 - 1) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 - 2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Kelompok, Jabatan fungsional

2.3 VISI DAN MISI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan visi yaitu:

“Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas Menuju Sulawesi Tengah yang Berdaya Saing”

Makna pokok yang terkandung visi di atas adalah :

Pengendalian Penduduk merupakan suatu kondisi menurunnya Total Fertility Rate di Sulawesi Tengah yang pada akhirnya dapat menekan laju pertumbuhan penduduk < 2,5 pada tahun 2021 serta diiringi dengan

Keluarga berkualitas yang ditandai dengan perkawinan yang sah hidup sehat maju dan mandiri berbudaya dengan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Berdaya saing adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu keluarga dan ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merumuskan Misi yang memuat sasaran yang harus di capai pada kurun lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
2. Menjamin Tersedianya upah penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang paripurna, berkeadilan, merata dan bermutu dengan perhatian khusus pada daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan
3. Meningkatkan Kerjasama, kemitraan antar lembaga pemerintah, swasta dan organisasi.
4. Menjamin Ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana pendukung pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Misi 1 : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ikut serta dalam mendukung program pembangunan. Hasil yang diharapkan adalah timbulnya kesadaran, kemauan dan kemandirian untuk melakukan upaya perencanaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

- Misi 2 : Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan paripurna yang sebaik-baiknya dan menyeluruh meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative tanpa membedakan kesenjangan sosial, ekonomi maupun geografis, untuk itu pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana harus bermutu, merata, terjangkau, berkeseimbangan dan berkeadilan. Bentuk pelayanan kepada masyarakat mulai dari komunikasi informasi dan edukasi, pelayanan pemasangan kontrasepsi serta pemberian pengayoman yang akhirnya mengarah pada peningkatan kesertaan ber KB serta kesejahteraan keluarga.
- Misi 3 : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta organisasi terkait dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan dan kerja sama tersebut diwujudkan dalam suatu jejaring agar diperoleh suatu koordinasi dan sinergitas yang baik serta saling mendukung dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Misi 4 : Ketersediaan sumberdaya merupakan komponen yang sangat menentukan keberlangsungan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penyelenggaraan pelayanan harus adanya kepastian tenaga yang cukup dan berkualitas, sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan.

2.4 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dicapai adalah meningkatnya pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera agar terwujud kualitas manusia yang berdaya saing dan berbudaya.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 3,1 pada tahun 2016 menjadi 2,5 pada tahun 2021.
2. Meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) dari 52,5% tahun 2016 menjadi 65% pada tahun 2021.
3. Meningkatnya persentase KB aktif melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari 19% pada tahun 2016 menjadi 23,3% pada tahun 2021.
4. Menurunnya persentase Keluarga Prasejahtera dari 49% menjadi 35% pada tahun 2021.

2.5 STRATEGI

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah beberapa strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Advokasi
2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kependudukan dan KB dengan pengutamaan pada upaya Komuditas Informasi dan Edukasi
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga lapangan Keluarga Berencana dan Tenaga Kesehatan pelayanan keluarga Berencana
5. Meningkatkan ketersediaan , keterjangkauan dan pemerataan alat dan obat kontrasepsi serta sarana lainnya
6. Meningkatkan kebijakan dan manajemen pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Selanjutnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas sebagai lembaga pelayanan publik di daerah. Adapun program-program tersebut terdiri dari 8 (delapan) program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pelayanan Kontrasepsi
6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam KB
7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
8. Program Keluarga Berencana

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam kegiatan- kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja	10.880.116.653,00	10.646.035.246,00	97,85	(234.081.407,00)
Belanja Operasi Non Program	5.967.784.712,00	5.807.983.979,00	97,32	(159.800.733,00)
Belanja Operasi Program	4.912.331.941,00	4.838.051.267,00	98,49	(74.280.674,00)

3.1.1 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 mengelola anggaran belanja operasi program sebesar Rp4.912.331.941,00 dan anggaran belanja operasi non program sebesar Rp5.091.792.914,97 sehingga total anggaran belanja sebesar Rp4.912.331.941,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, jumlah realisasi untuk belanja operasi program sebesar Rp4.838.051.267,00 atau 97,32 persen dari jumlah anggaran, sedangkan untuk belanja operasi non program terealisasi sebesar Rp5.807.983.979,00 atau 93,48 persen dari jumlah anggaran. Sehingga total realisasi belanja di tahun 2021 sebesar Rp10.646.035.246,00 atau 97,85 persen dari total anggaran. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.534.950,00	180.301.050,00	(18.233.900,00)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.102.550,00	49.373.550,00	(2.729.000,00)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.206.775,00	24.206.775,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.665.350,00	11.665.350,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110.560.275,00	95.055.375,00	(15.504.900,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	615.965.125,00	604.715.125,00	(11.250.000,00)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	548.709.625,00	537.759.625,00	(10.950.000,00)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.200.000,00	36.900.000,00	(300.000,00)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.055.500,00	30.055.500,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.344.500,00	175.374.500,00	(4.970.000,00)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.250.000,00	76.800.000,00	(450.000,00)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103.094.500,00	98.574.500,00	(4.520.000,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.055.917.616,00	1.043.221.100,00	(12.696.516,00)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	636.538.566,00	636.050.100,00	(488.466,00)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.441.550,00	205.733.500,00	(2.708.050,00)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.817.500,00	18.217.500,00	(1.600.000,00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.120.000,00	183.220.000,00	(7.900.000,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.242.100,00	329.222.013,00	(4.020.087,00)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	954.000,00	890.000,00	(64.000,00)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.878.824,00	129.903.987,00	(2.974.837,00)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.409.276,00	198.428.026,00	(981.250,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	310.940.000,00	310.922.604,00	(17.396,00)

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.500.000,00	267.482.604,00	(17.396,00)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.440.000,00	43.440.000,00	0,00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	221.991.200,00	219.716.200,00	(2.275.000,00)
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	161.271.500,00	158.996.500,00	(2.275.000,00)
Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	60.719.700,00	60.719.700,00	0,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	202.641.500,00	194.118.700,00	(8.522.800,00)
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	202.641.500,00	194.118.700,00	(8.522.800,00)
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	273.362.425,00	268.982.450,00	(4.379.975,00)
Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	75.025.900,00	73.545.925,00	(1.479.975,00)
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	198.336.525,00	195.436.525,00	(2.900.000,00)
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	239.597.200,00	237.027.200,00	(2.570.000,00)

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	99.999.925,00	99.499.925,00	(500.000,00)
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	57.109.875,00	56.089.875,00	(1.020.000,00)
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	82.487.400,00	81.437.400,00	(1.050.000,00)
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.163.551.475,00	1.160.306.475,00	(3.245.000,00)
Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	41.710.725,00	41.710.725,00	0,00
Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	12.435.750,00	12.435.750,00	0,00
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	35.283.850,00	35.283.850,00	0,00
Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	942.000.000,00	941.355.000,00	(645.000,00)
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	13.188.525,00	10.588.525,00	(2.600.000,00)
Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	14.376.175,00	14.376.175,00	0,00
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00
Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	4.793.725,00	4.793.725,00	0,00
Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	14.180.125,00	14.180.125,00	0,00

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	33.222.600,00	33.222.600,00	0,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	116.243.850,00	114.143.850,00	(2.100.000,00)
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	35.250.000,00	34.800.000,00	(450.000,00)
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	19.570.000,00	18.420.000,00	(1.150.000,00)
Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	27.199.950,00	26.699.950,00	(500.000,00)
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan P	27.753.900,00	27.753.900,00	0,00
Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
- c. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- d. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- e. Piutang
1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain,

pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

- c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
 3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
 4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana

cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kapitalisasi Aset Tetap

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
21	Konstruksi Jalan	Rp. 10.000.00,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp. 300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000,00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 50.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
30	Alat-alat Peralatan/Keamanan	Rp. 500.000,00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp. 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di

masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaa dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d) sumber dana cadangan.
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..

- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui beahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan dengan belanja, antara lain:
- 1) Pengeluaran belanja berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

- c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 1. Saat timbulnya kewajiban;
 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan

yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

- ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- v. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang di maksud.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	10.646.035.246,00	6.677.073.871,00

Realisasi anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp10.646.035.246,00 atau 97,85 persen dari anggaran belanja yang sebesar Rp10.880.116.653,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp3.968.961.375,00 dari tahun 2020 yang sebelumnya berada pada nilai Rp6.677.073.871,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021

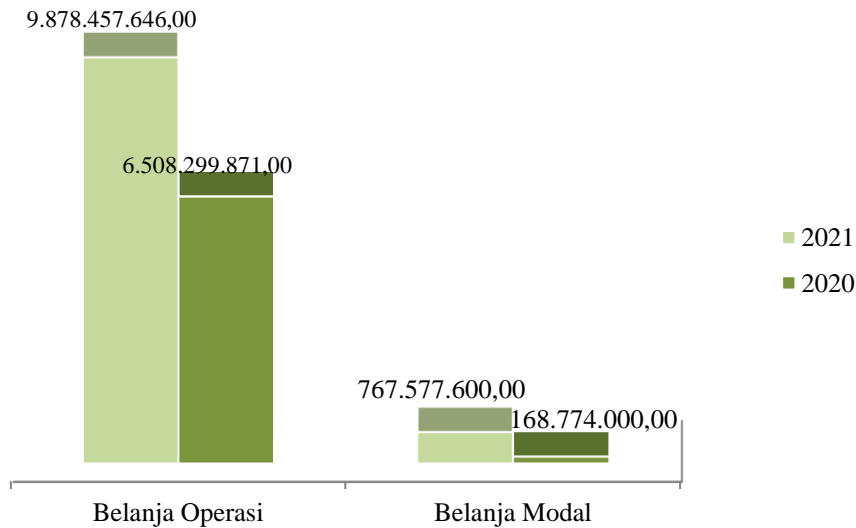
Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	10.109.570.963,00	9.878.457.646,00	97,71	(231.113.317,00)
Belanja Modal	770.545.690,00	767.577.600,00	99,61	168.774.000,00
Total Belanja	10.880.116.653,00	10.646.035.246,00	97,85	(234.081.407,00)

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp9.878.457.646,00. Jumlah realisasi tersebut mencapai 97,71 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian belanja modal, Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp767.577.600,00 atau 99,61 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp3.370.157.775,00 yang sebelumnya realisasi di tahun 2020 sebesar Rp6.508.299.871,00 bertambah menjadi Rp9.878.457.646,00 di tahun 2021. Realisasi Belanja Modal tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp598.803.600,00 dari nilai realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp168.774.000,00 menjadi Rp767.577.600,00 di tahun 2021. Berikut gambar komparasi realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun 2021 dan tahun 2020.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2021 dan Tahun 2020



5.1.2.1 Belanja Operasi

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	9.878.457.646,00	6.508.299.871,00

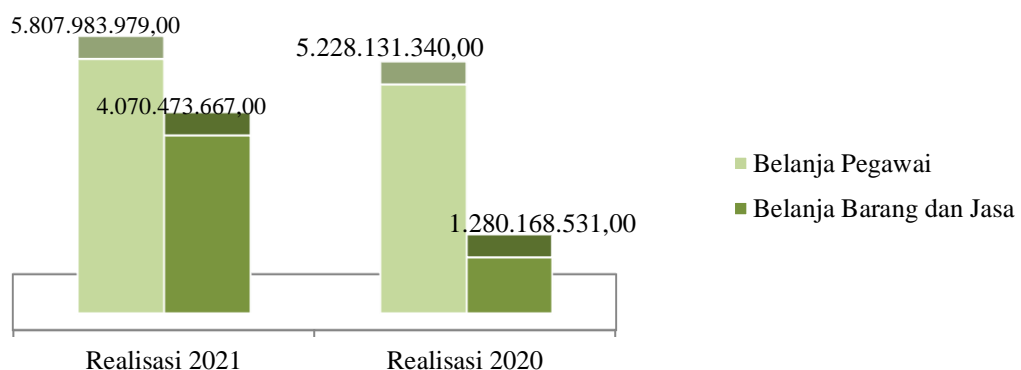
Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp9.878.457.646,00 atau 97,71 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp10.109.570.963,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Berikut ini rincian realisasi dari Belanja Operasi tahun 2021.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	5.967.784.712,00	5.807.983.979,00	97,32	(159.800.733,00)
Belanja Barang dan Jasa	4.141.786.251,00	4.070.473.667,00	98,28	(71.312.584,00)
Jumlah	10.109.570.963,00	9.878.457.646,00	97,71	(231.113.317,00)

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Operasi tahun 2021 terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp5.807.983.979,00 atau 97,32 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.967.784.712,00 dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp4.070.473.667,00 atau 98,28 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.141.786.251,00. Berdasarkan realisasi dua kelompok belanja operasi tahun 2021 tersebut, maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp231.113.317,00. Realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp579.852.639,00 dari nilai realisasi belanja pegawai tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.228.131.340,00 dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.790.305.136,00 dari nilai realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 yang sebesar Rp1.280.168.531,00. Berikut disajikan grafik komparasi nilai realisasi masing-masing kelompok belanja operasi untuk tahun 2021 dan 2020.

Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Kelompok Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020



	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	5.807.983.979,00	5.228.131.340,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 sebesar Rp5.807.983.979,00 atau 97,32

persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini bertambah sebesar Rp579.852.639,00 dari jumlah realisasi tahun 2020 yang sejumlah Rp5.967.784.712,00 . Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2021.

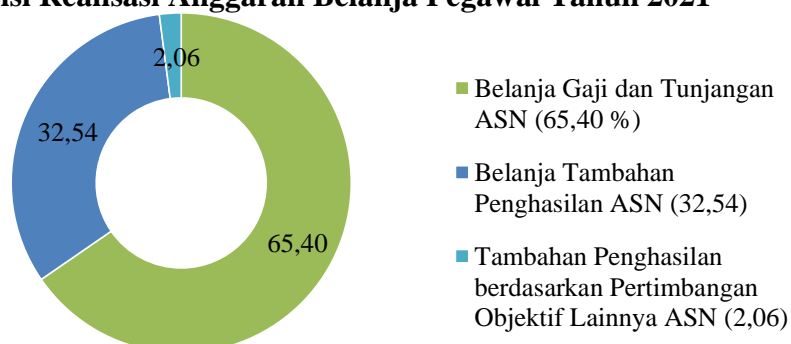
Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.893.803.180,00	3.798.249.349,00	97,55	(95.553.831,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.952.181.532,00	1.889.974.630,00	96,81	(62.206.902,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	121.800.000,00	119.760.000,00	98,33	(2.040.000,00)
Jumlah	5.967.784.712,00	5.807.983.979,00	97,32	(159.800.733,00)

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja pegawai tahun 2021 terdiri dari tiga kelompok yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja tambahan penghasilan ASN dan Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.798.249.349,00 atau mencapai 97,55 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp3.893.803.180,00. Kelompok belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.889.974.630,00 atau 96,81 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.952.181.532,00. Kelompok tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2021 terealisasi sebesar 98,33 persen atau sebesar Rp119.760.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp121.800.000,00.

Gambar 5.3 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi belanja pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

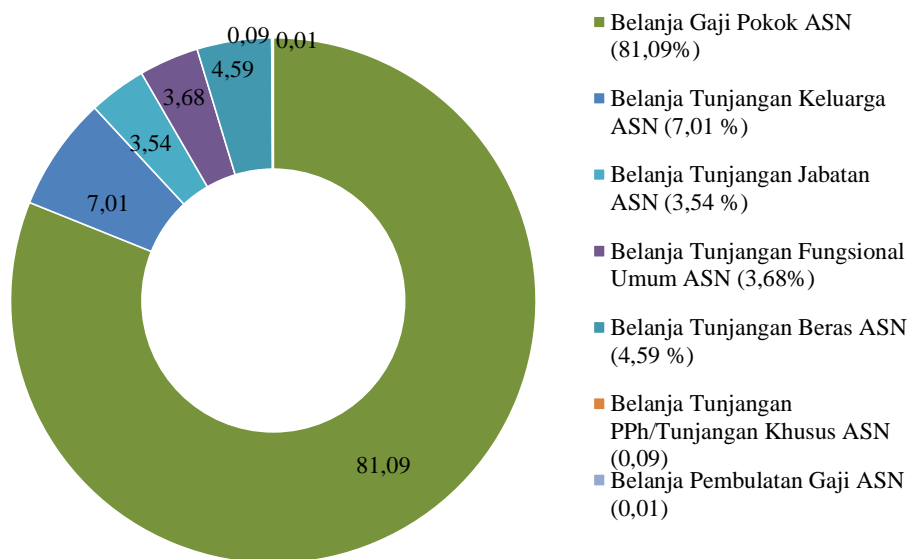
Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021



Pada gambar 5.3 diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN memiliki kontribusi paling dominan yaitu sebesar 65,40 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2021. Sedangkan kelompok dengan kontribusi terkecil yaitu kelompok tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yaitu hanya sebesar 2,06 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2021.

Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai juga memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Gambar 5.5 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja gaji dan tunjangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 yang merupakan kelompok dengan kontribusi terbesar terhadap jumlah realisasi belanja pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Anggaran Kelompok
Belanja Gaji dan Tunjangan



Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan, komposisi realisasi terbesar yaitu pada item belanja gaji pokok ASN yaitu sebesar Rp3.079.913.700,00 atau berkontribusi sebesar 98,95 persen terhadap total realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2021. Sedangkan komposisi realisasi terkecil yaitu pada item belanja pembulatan gaji yaitu sebesar Rp39.218,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,01 persen dari total realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2021.

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.070.473.667,00	1.280.168.531,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (PEMDA) dan belanja perjalanan. Belanja barang dan jasa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.070.473.667,00 atau 98,28 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp4.141.786.251,00. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp2.790.305.136,00 dari jumlah belanja barang dan jasa yang terealisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.280.168.531,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2021.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
untuk tahun 2021

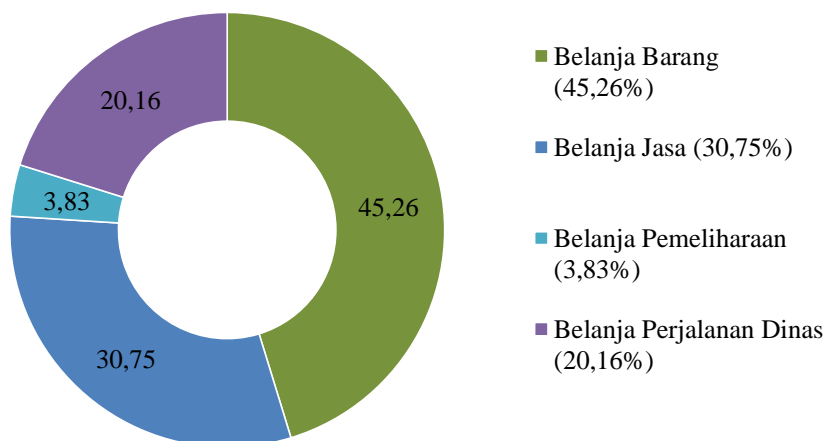
Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	1.849.928.652,00	1.842.319.976,00	99,59	(7.608.676,00)
Belanja Jasa	1.273.219.599,00	1.251.660.787,00	98,31	(21.558.812,00)
Belanja Pemeliharaan	155.940.000,00	155.922.604,00	99,99	(17.396,00)
Belanja Perjalanan Dinas	862.698.000,00	820.570.300,00	95,12	(42.127.700,00)
Total	4.141.786.251,00	4.070.473.667,00	98,28	(71.312.584,00)

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari kelompok realiasi belanja barang untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.842.319.976,00 atau 99,59 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.849.928.652,00. Kelompok realisasi belanja jasa terealisasi sebesar Rp1.251.660.787,00 atau 98,31 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.273.219.599,00. Kelompok realisasi belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp155.922.604,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp155.940.000,00.>Kelompok realisasi belanja perjalanan Dinas sebesar

Rp820.570.300,00 atau 95,12 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp862.698.000,00.

Gambar 5.5 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi belanja barang dan jasa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa



Pada gambar 5.5 diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja barang memiliki kontribusi terbesar terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 yaitu sebesar 45,26 persen. Sedangkan kelompok dengan kontribusi terkecil yaitu kelompok belanja pemeliharaan yaitu hanya sebesar 3,83 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021.

Pada kelompok dalam belanja barang tahun 2021, hanya terdiri dari item belanja barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp1.842.319.976,00 dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok belanja barang pakai habis item belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak terealisasi sebesar Rp998.445.525,00 atau 99,32 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.005.299.525,00 merupakan jenis belanja yang memiliki realisasi tertinggi dari jumlah realisasi belanja bahan pakai habis sedangkan item belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat listrik terealisasi sebesar Rp1.190.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.190.000,00 merupakan jenis belanja yang memiliki realisasi terendah dari jumlah realisasi belanja bahan pakai habis. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja bahan pakai habis tahun 2021.

Tabel 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis
Tahun 2021

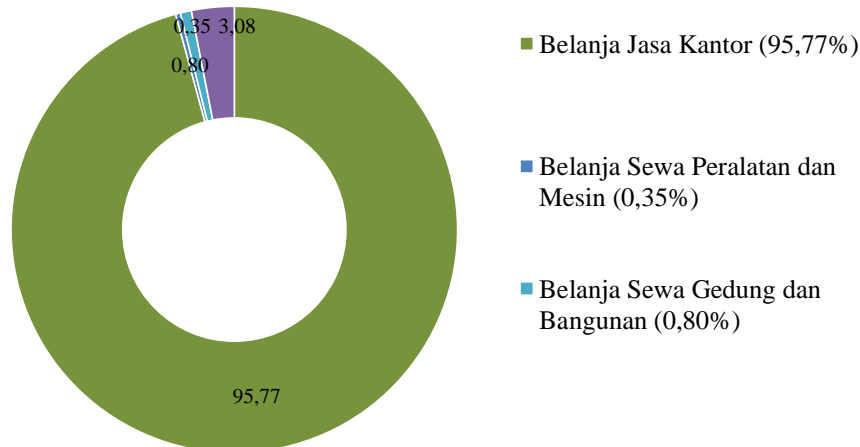
Uraian	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155.000.000,00	155.000.000,00	8,41
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	93.127.816,00	92.899.390,00	5,04
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	83.843.575,00	83.767.325,00	4,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.005.299.525,00	998.445.525,00	54,20
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.960.000,00	3.960.000,00	0,21
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	30.141.936,00	30.141.936,00	1,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.190.000,00	1.190.000,00	0,06
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	24.788.800,00	24.788.800,00	1,35
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	269.897.000,00	269.897.000,00	14,65
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.680.000,00	31.680.000,00	1,72
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	35.000.000,00	35.000.000,00	1,90
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	47.250.000,00	46.800.000,00	2,54
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	38.750.000,00	38.750.000,00	2,10
Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	1,63
Jumlah	1.849.928.652,00	1.842.319.976,00	100,00

Pada tabel 5.5 diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja barang pakai habis pada item belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak memiliki komposisi sebesar 54,20 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi tertinggi dari komposisi belanja bahan pakai habis sedangkan item belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat listrik memiliki komposisi sebesar 0,06 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terendah dari jumlah komposisi belanja bahan pakai habis.

Kelompok belanja jasa terdiri dari empat item belanja yaitu belanja kantor yang terelaisasi sebesar Rp1.198.710.987,00 atau 98,24 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.220.234.824,00. Item belanja sewa peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp4.355.000,00 atau 99,89 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp4.355.000,00. Item belanja sewa gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar

Rp10.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp10.000.000,00. Item belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang terealisasi sebesar Rp38.599.800,00 atau 99,92 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp38.629.775,00. Gambar 5.9 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja jasa.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2021



Pada gambar 5.6 diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja Jasa pada item belanja jasa kantor memiliki komposisi sebesar 95,77 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi tertinggi dari komposisi belanja jasa sedangkan item belanja sewa dan bangunan memiliki komposisi sebesar 0,08 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terendah dari jumlah komposisi belanja jasa. Berikut disajikan Komposisi Realisasi anggaran pada kelompok belanja jasa kantor

Tabel 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa Kantor Tahun 2021

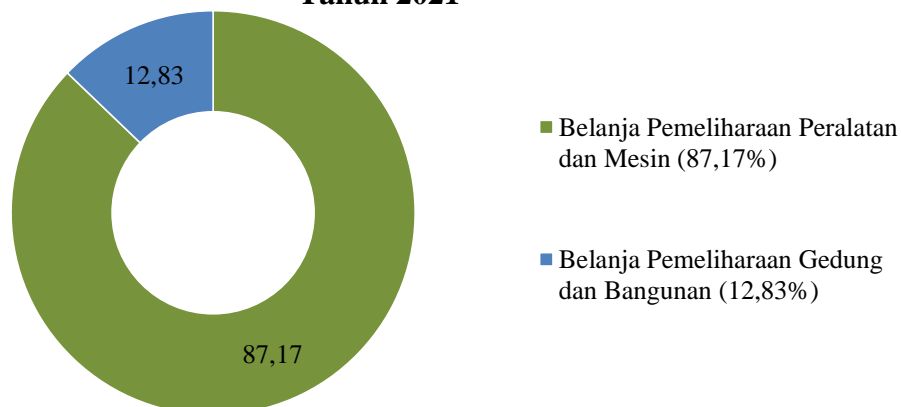
Uraian	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	242.250.000,00	234.630.000,00	19,57
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.360.000,00	60.360.000,00	5,04
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	481.200.000,00	472.200.000,00	39,39
Belanja Jasa Tenaga Ahli	62.200.000,00	61.900.000,00	5,16
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000,00	34.500.000,00	2,88
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	35.000.000,00	35.000.000,00	2,92

Uraian	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	155.112.000,00	155.047.000,00	12,93
Belanja Tagihan Listrik	92.878.824,00	89.903.987,00	7,50
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,35
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.000.000,00	20.000.000,00	1,67
Belanja Paket/Pengiriman	954.000,00	890.000,00	0,07
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000,00	20.000.000,00	1,67
Belanja Lembur	10.080.000,00	10.080.000,00	0,84
Belanja Jasa Kantor	1.220.234.824,00	1.198.710.987,00	100,00

Pada tabel 5.6 diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja jasa kantor pada item belanja jasa tenaga pelayanan umum memiliki komposisi sebesar 39,39 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi tertinggi dari komposisi belanja jasa kantor sedangkan item belanja paket/pengiriman memiliki komposisi sebesar 0,07 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terendah dari jumlah komposisi belanja jasa kantor

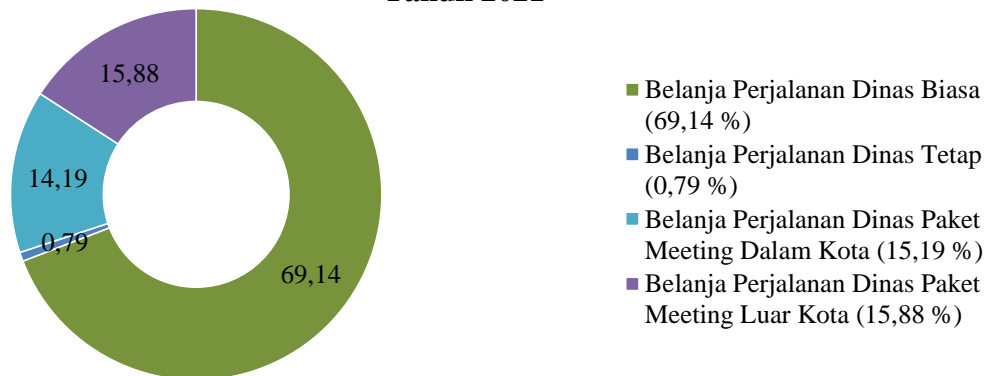
Kelompok belanja pemeliharaan terdiri dari dua item belanja yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terelaisasi sebesar Rp135.922.604,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 135.940.000,00. Item belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp20.000.000,00. Gambar 5.9 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja pemeliharaan.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Tahun 2021



Pada kelompok dalam belanja perjalanan dinas tahun 2021, hanya terdiri dari item belanja perjalanan dinas dalam negeri terealisasi sebesar Rp820.570.300,00 dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok belanja perjalanan dinas dalam negeri item belanja perjalanan dinas biasa terealisasi sebesar Rp567.370.300,00 atau 93,57 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp606.348.000,00 merupakan jenis belanja yang memiliki realisasi tertinggi dari jumlah realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri sedangkan item belanja perjalanan dinas tetap terealisasi sebesar Rp 6.470.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp6.470.000,00 merupakan jenis belanja yang memiliki realisasi terendah dari jumlah realisasi belana perjalanan dinas dalam negeri. Berikut disajikan komposisi realisasi belana perjalanan dinas dalam negeri 2021.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021



	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	767.577.600,00	168.774.000,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp767.577.600,00 atau 99,61 persen dari anggaran sebesar Rp770.545.690,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar Rp598.803.600,00 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp168.774.000,00. Rincian realisasi belanja modal tahun 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.733.500,00	168.774.000,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 sebesar Rp205.733.500,00 atau 98,70 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp208.441.550,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp2.708.050,00. Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp36.959.500,00 dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020 yang sejumlah Rp168.774.000,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2021.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	158.566.400,00	158.133.500,00	99,73	(432.900,00)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.125.150,00	0,00	0,00	(2.125.150,00)
Belanja Modal Komputer	47.750.000,00	47.600.000,00	99,69	(150.000,00)
Jumlah	208.441.550,00	205.733.500,00	98,70	(2.708.050,00)

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 yang terealisasi terdiri dari kelompok belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang terelalisasi sebesar Rp158.133.500,00 atau 99,73 persen dari yang dianggarkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp158.566.400,00. Realisasi nilai belanja modal alat kantor dan rumah tangga terdiri dari dua item belanja yaitu belanja modal kantor sebesar Rp37.263.500,00 dan belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp120.870.000,00.

Belanja modal komputer yang terealisasi sebesar Rp47.600.000,00 atau 99,69 persen dari yang dianggarkan pada tahun 2021 Rp47.750.000,00. Realisasi nilai belanja modal komputer terdiri dari dua item belanja yaitu belanja modal komputer unit sebesar Rp35.800.000,00 dan belanja modal peralatan komputer sebesar Rp11.800.000,00. Sedangkan pada kelompok belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar tidak terdapat realisasi pada tahun 2021 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.125.150,00.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Bangunan Gedung	561.844.100,00	0,00

Realisasi belanja modal bangunan gedung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2021 sebesar Rp561.844.100,00 atau 99,95 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp562.104.140,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp260.040,00. Jumlah realisasi belanja modal bangunan gedung tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp561.844.100,00 dari jumlah realisasi belanja modal bangunan gedung tahun 2020 yang sejumlah Rp0,00. Nilai belanja modal bangunan gedung berasal dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang terdiri dari dua item belanja yaitu relisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp162.104.100,00 dan Belanja Modal Taman sebesar Rp 399.740.000,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(10.646.035.246,00)	(6.677.073.871,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2021 mengalami Defisit sebesar Rp10.646.035.246,00. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 mengalami penurunan defisit sebesar Rp3.968.961.375,00 dari jumlah defisit tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.677.073.871,00

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1. Aset	16.470.582.370,00	16.257.901.616,00

Aset adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

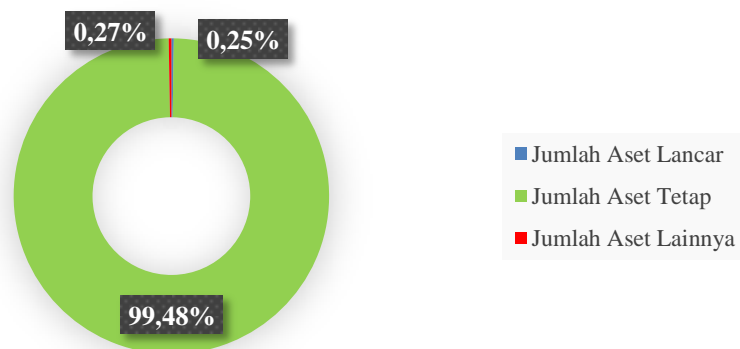
Jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.470.582.370,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp212.680.754,00 bila dibandingkan dengan nilai aset yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.257.901.616,00. Aset yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya, tabel berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel 5.8
Rincian Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Lancar	40.983.380,00	916.250,00
Aset Tetap	16.385.278.967,00	16.114.549.643,00
Aset Lainnya	44.320.023,00	142.435.723,00
Jumlah	16.470.582.370,00	16.257.901.616,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 berasal dari aset lancar sebesar Rp40.983.380,00, aset tetap sebesar Rp16.385.278.967,00 serta aset lainnya sebesar Rp44.320.023,00. Pada kelompok aset yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021, komposisi terbanyak dimiliki oleh kelompok aset tetap dengan persentase sebesar 99,48 persen dari total aset yang dimiliki. Sedangkan kelompok aset dengan persentase paling kecil adalah kelompok aset lancar dengan persentase sebesar 0,25 persen dari total aset yang dimiliki. Berikut gambar komposisi aset yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021.

Gambar 5.9
Komposisi Aset Per 31 Desember 2021



5.2.1.1. Aset Lancar

Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
40.983.380,00	916.250,00

Aset lancar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.983.380,00. Jumlah tersebut lebih

besar dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp916.250,00, atau terdapat peningkatan sebesar Rp40.067.130,00. Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

Tabel 5.9
Rincian Aset Lancar
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	40.983.380,00	916.250,00
Jumlah	40.983.380,00	916.250,00

Berdasarkan tabel 5.9 aset lancar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 hanya terdiri dari persediaan sebesar Rp40.983.380,00.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2021.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. BKU: 27387/2021 tanggal 31 Desember 2021 dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dikembalikan Uang Persediaan (UP) untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp112.460.707,00. Selain itu, rekening koran Bank Sulteng dengan nomor rekening 0010103200267 per 31 Desember 2021 telah bersaldo Nihil.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.1.2. Persediaan	40.983.380,00	916.250,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* dengan nomor 900./443/DP2KB/2021, persediaan barang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.983.380,00, sedangkan jumlah persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp916.250,00. Peningkatan nilai persediaan mencapai 4.372,95 persen dari tahun 2020 atau sebesar Rp40.067.130,00. Berikut rincian persediaan per 31 Desember 2021.

Tabel 5.10
Rincian Persediaan Akhir
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Persediaan Alat Tulis Kantor	8.766.600,00	690.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	32.015.530,00	76.250,00
Persediaan Bahan Cetak	201.250,00	150.000,00
Jumlah	40.983.380,00	916.250,00

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa persediaan akhir milik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp8.766.600,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.076.600,00 dibandingkan nilai persediaan alat tulis kantor yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp690.000,00, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp32.015.530,00 mengalami peningkatan sebesar Rp31.939.280,00 dibandingkan nilai persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp76.250,00, persediaan bahan cetakan sebesar

Rp201.250,00 Mengalami peningkatan sebesar Rp51.250,00 dibandingkan persediaan bahan cetakan per 31 Desember 2020 sebesar Rp150.000,00.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2. Aset Tetap	16.385.278.967,00	16.114.549.643,00

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2021 merupakan nilai aset tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Jumlah aset tetap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.385.278.967,00. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengurangan harga perolehan aset tetap sebesar Rp18.841.089.554,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.455.810.587,00. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2021 lebih besar bila dibandingkan jumlah aset tetap per 31 Desember 2020. Artinya, terdapat kenaikan sebesar Rp270.729.324,00 dari jumlah aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2020. Berikut rincian aset tetap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan.

Tabel 5.11
Rincian Aset Tetap
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2020	Mutasi Tambah/(Kurang)	31 Desember 2021
Tanah	7.660.900.000,00	0,00	7.660.900.000,00
Peralatan dan Mesin	3.084.198.233,00	187.506.000,00	3.271.704.233,00
Gedung dan Bangunan	7.060.329.221,00	561.844.100,00	7.622.173.321,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	150.300.000,00	150.300.000,00
Aset Tetap Lainnya	151.537.000,00	(15.525.000,00)	136.012.000,00
Jumlah	17.956.964.454,00	884.125.100,00	18.841.089.554,00

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa jumlah aset tetap sebelum dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp18.841.089.554,00, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp884.125.100,00 dari nilai yang disajikan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut berasal dari mutasi bertambah berupa realisasi belanja modal, mamping kodefikasi

nilai peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2016 dan adanya mutasi berkurang berupa reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain dan mapping kodefikasi peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2016.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.2.1. Tanah	7.660.900.000,00	7.660.900.000,00

Jumlah aset tetap - tanah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.660.900.000,00. Jumlah tersebut sama dengan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2020. Tanah yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperoleh dari adanya penyerahan tanah dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air berdasarkan berita acara serah terima (BAST) Nomor 028/1550/BPKAD pada tanggal 17 Februari 2021. Tanah tersebut berupa tanah bangunan kantor pemerintah yang berlokasi di Jl. Kartini No. 100 Kota Palu dengan luas 5.000 m².

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin	3.271.704.233,00	3.084.198.233,00

Jumlah aset tetap peralatan dan mesin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.271.704.233,00. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp187.506.000,00 dari jumlah aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp3.084.198.233,00. Berikut disajikan rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021.

Tabel 5.12
Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Alat-alat angkutan	1.650.019.775,00	1.650.019.775,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.050.407.058,00	1.397.328.458,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	21.250.000,00	36.850.000,00
Komputer	534.502.400,00	0,00
Peralatan Olahraga	15.525.000,00	0,00
Jumlah	3.271.704.233,00.	3.084.198.233,00

Berdasarkan tabel diatas, jenis peralatan dan mesin yang mengalami perubahan adalah alat kantor dan rumah tangga yang mengalami penurunan sebesar

Rp346.921.400,00, alat studio dan alat komunikasi mengalami penurunan sebesar Rp15.600.000,00, sedang untuk komputer mengalami penambahan nilai sebesar Rp534.502.400,00 dari tahun sebelumnya yang bernilai nihil, serta Peralatan Olahraga juga mengalami penambahan nilai sebesar Rp15.525.000,00 dari tahun sebelumnya yang bernilai nihil. Sedangkan pada Jenis alat-alat angkutan tidak mengalami perubahan. Jumlah perubahan aset tetap peralatan dan mesin tersebut berasal dari adanya mutasi bertambah dan mutasi berkurang. Berikut disajikan rincian mutasi aset tetap peralatan mesin tahun 2021.

Tabel 5.13
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	3.084.198.233,00
Mutasi Bertambah :	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021	205.733.500,00
Mapping Kode Nilai Permendagri 108	15.525.000,00
Total Mutasi Bertambah	221.258.500,00
Mutasi Berkurang :	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	30.752.500,00
Barang ekstrakomptabel	3.000.000,00
Total Mutasi Berkurang	33.752.500,00
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	3.271.704.233,00.

Mutasi bertambah pada aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021 berasal dari realisasi belanja modal tahun 2021 sebesar Rp205.733.500,00 yang rinciannya telah dijelaskan pada penjelasan mengenai belanja modal peralatan dan mesin dan bertambahnya aset tetap peralatan dan mesin juga berasal dari mapping kode nilai permendagri 108 (reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke aset tetap peralatan dan mesin) sebesar Rp15.525.000,00. Sedangkan mutasi berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin tahun 2021 berasal dari reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain (aset rusak berat/usang) sebesar Rp30.752.500,00 dan adanya aset tetap yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap (ekstrakomptabel) sebesar Rp3.000.000,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan	7.622.173.321,00	7.060.329.221,00

Jumlah aset tetap - gedung dan bangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar

Rp7.622.173.321,00. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan jumlah aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 yang disajikan sebesar Rp7.060.329.221,00. Bertambahnya aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari realisasi belanja modal sebesar Rp561.844.100,00. Aset tetap - gedung dan bangunan hanya terdiri dari bangunan gedung kantor permanen.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.2.4. Jalan jaringan dan Irigasi	150.300.000,00	0,00

Jumlah aset tetap – jalan, jaringan dan irigasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp150.300.000,00 jumlah tersebut mengalami perubahan bila dibandingkan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau nihil. Bertambahnya aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari mutasi dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sesuai berita acara Nomor 822.2/22/KE.ASET-CIKASDA/2021 tanggal 3 November 2021 sebesar Rp150.300.000,00 yang berupa bangunan air

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya	136.012.000,00	151.537.000,00

Jumlah aset tetap lainnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp136.012.000,00 Jumlah tersebut menurun sebesar Rp15.525.000,00 dibandingkan dengan nilai aset tetap lainnya yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp151.537.000,00. Mutasi berkurang aset tetap lainnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari mapping kode nilai permendagri 108 (reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke aset tetap peralatan dan mesin) sebesar Rp15.525.000,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.2.1.2.6. Akumulasi Penyusutan	2.455.810.587,00	1.842.414.811,00

Jumlah akumulasi penyusutan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.455.810.587,00. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp613.395.776,00 dibandingkan nilai akumulasi

penyusutan yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.842.414.811,00. Berikut disajikan akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.14
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Koreksi Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.627.204.635,00	24.539.614,00	467.328.930,00	2.069.993.951,00
Gedung dan Bangunan	211.809.876,00	0,00	141.082.720,00	352.892.596,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	23.797.500,00	3.006.000,00	26.803.500,00
Aset Tetap Lainnya	3.400.300,00	0,00	2.720.240,00	6.120.540,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.842.414.811,00	48.337.114,00	614.137.890,00	2.455.810.587,00

5.2.1.3. Aset Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020
(Rp)	(Rp)
44.320.023,00	142.435.723,00

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.320.023,00 yang berupa aset rusak berat/usang dan akumulasi penyusutan aset lainnya. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp98.115.700,00 atau 68,88 persen bila dibandingkan dengan nilai aset lainnya yang disajikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp142.435.723,00.

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 desember 2021 sebesar Rp81.760.077,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.870.944,00 bila dibandingkan dengan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 desember 2020 sebesar Rp147.631.021,00. Hal tersebut disebabkan adanya beban penyusutan aset lainnya sebesar Rp5.138.635,00 dan Koreksi ekuitas lainnya yang mengurangi akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp71.009.579,00.

Nilai aset lainnya yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2021 berasal dari aset lain-lain. Pembentukan aset lain-lain per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.15
Pembentukan Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	(Rp)
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020	290.066.744,00
<i>Mutasi bertambah aset lain-lain yang reklasifikasi dari aset tetap</i>	30.752.500,00
<i>Mutasi berkurang aset lain-lain yang disebabkan adanya penghapusan (No SK Penghapusan : 024/5644/BPKAD tanggal 7 Juli 2021)</i>	(194.739.144,00)
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	126.080.100,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020	147.631.021,00
<i>Koreksi Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat</i>	(71.009.579,00)
<i>Beban Penyusutan Aset Lainnya</i>	5.138.635,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021	81.760.077,00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	44.320.023,00

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.2. Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Jumlah kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan nilai kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2020.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.2.3. Ekuitas	16.470.582.370,00	16.257.901.616,00

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember Tahun 2021 disajikan sebesar Rp16.470.582.370,00 sedangkan jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.257.901.616,00. Artinya,

terdapat kenaikan nilai ekuitas sebesar Rp212.680.754,00. Berikut disajikan rincian ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2021.

Tabel 5.16
Rincian Laporan Ekuitas
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	16.257.901.616,00	9.065.493.989,00
Surplus/(Defisit) – LO	(10.460.667.041,00)	(7.154.135.297,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	27.312.549,00	7.669.523.053,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	10.646.035.246,00	6.677.019.871,00
Ekuitas Akhir	16.470.582.370,00	16.257.901.616,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih pendapatan operasional dengan beban. Lebih terperinci mengenai pendapatan dan beban operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai laporan operasional. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai laporan perubahan ekuitas.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00

Pendapatan daerah – LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Nilai pendapatan daerah – LO diakui ketika adanya timbul hak atas pendapatan. Sampai dengan 31 Desember 2021, tidak ada pendapatan yang diterima oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2 Beban	10.460.667.041,00	7.154.135.297,00

Beban yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 sebesar Rp10.460.667.041,00, atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.306.531.744,00 dari jumlah beban tahun 2020 sebesar Rp7.154.135.297,00. Beban - LO tahun 2021 berupa beban operasi.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	10.460.667.041,00	7.154.135.297,00

Beban operasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021 mencakup beban pegawai, beban barang dan jasa, beban alin-lain, Beban penyusutan peralatan dan mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, Beban Penyusutan Aset tetap lainnya, serta Beban Penyusutan Aset Lainnya. Beban operasi tahun 2021 disajikan sebesar Rp10.460.667.041,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.306.531.744,00 atau 46,22 persen dibandingkan dengan nilai beban operasi di tahun 2020 sebesar Rp7.154.135.297,00. Berikut ini rincian beban operasi pada tahun 2021 serta 2020 sebagai perbandingan.

Tabel 5.17
Rincian Beban Operasi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Pegawai	5.807.983.979,00	5.228.131.340,00
Beban Barang dan Jasa	4.030.406.537,00	1.284.912.281,00
Beban Lain-lain	3.000.000,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	467.328.930,00	497.164.852,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	141.082.720,00	141.206.584,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.006.000,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.720.240,00	2.720.240,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.138.635,00	0,00
Jumlah	10.460.667.041,00	7.154.135.297,00

Tabel 5.17 menunjukkan bahwa dari rincian beban operasi tahun 2021 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp5.807.983.979,00, beban barang dan jasa sebesar Rp4.030.406.537,00, beban lain-lain sebesar Rp3.000.000,00, beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp467.328.930,00, beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp141.082.720,00, beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi serta sebesar Rp3.006.000,00, beban Penyusutan Aset tetap lainnya aset sebesar Rp2.720.240,00, serta beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp5.138.635,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2.1.1 Beban Pegawai	5.807.983.979,00	5.228.131.340,00

Beban pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp5.807.983.979,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp579.852.639,00 atau 11,09 persen dibandingkan nilai beban pegawai yang disajikan di tahun 2020 sebesar Rp5.228.131.340,00. Tabel berikut Berikut disajikan rincian atas beban pegawai dan perbandingannya dengan belanja pegawai tahun 2021.

Tabel 5.18
Rincian Beban Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Gaji Pokok PNS	3.079.913.700,00	3.079.913.700,00	0,00
Tunjangan Keluarga PNS	266.203.362,00	266.203.362,00	0,00
Tunjangan Jabatan PNS	134.600.000,00	134.600.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum PNS	139.670.000,00	139.670.000,00	0,00
Tunjangan Beras PNS	174.170.100,00	174.170.100,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.652.969,00	3.652.969,00	0,00
Pembulatan Gaji PNS	39.218,00	39.218,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.889.974.630,00	1.889.974.630,00	0,00
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	105.720.000,00	105.720.000,00	0,00
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Jumlah	5.807.983.979,00	5.807.983.979,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat selisih antara nilai belanja pegawai dan beban pegawai. Artinya, seluruh realisasi belanja pegawai tahun 2021 telah dibebankan pada periode yang sama.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	4.030.406.537,00	1.284.912.281,00

Beban barang dan jasa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp4.030.406.537,00. Nilai beban barang dan jasa tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.745.494.256,00 atau sebesar 213,67 persen dari nilai barang dan jasa tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp1.284.912.281,00. Tabel berikut menunjukkan perbandingan rincian atas belanja barang dan jasa serta pengakuan bebannya.

Tabel 5.19
Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
Bahan-Bahan Lainnya	92.899.390,00	92.899.390,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.690.725,00	83.767.325,00	8.076.600,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	998.394.275,00	998.445.525,00	51.250,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	30.218.186,00	30.141.936,00	(76.250,00)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(32.015.530,00)	0,00	32.015.530,00
Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	24.788.800,00	24.788.800,00	0,00
Makanan dan Minuman Rapat	269.897.000,00	269.897.000,00	0,00
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00
Pakaian Sipil Harian (PSH)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Pakaian Dinas Harian (PDH)	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
Pakaian Pelatihan Kerja	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00
Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	234.630.000,00	234.630.000,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	472.200.000,00	472.200.000,00	0,00
Jasa Tenaga Ahli	61.900.000,00	61.900.000,00	0,00
Jasa Tenaga Keamanan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	155.047.000,00	155.047.000,00	0,00
Tagihan Listrik	89.903.987,00	89.903.987,00	0,00
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Paket/Pengiriman	890.000,00	890.000,00	0,00
Beban	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Lembur	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
Sewa Alat Kantor Lainnya	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Sosialisasi	38.599.800,00	38.599.800,00	0,00
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	92.482.604,00	92.482.604,00	0,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.330.000,00	15.330.000,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Biasa	567.370.300,00	567.370.300,00	0,00
Perjalanan Dinas Tetap	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	116.435.000,00	116.435.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	130.295.000,00	130.295.000,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Jumlah	4.030.406.537,00	4.070.473.667,00	40.067.130,00

Berdasarkan Tabel 5.19 diatas maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realiasi belanja barang dan jasa pada tahun 2021 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan, yaitu terjadi pada:

1. Terdapat perbedaan sebesar Rp8.076.600,00 antara belanja dan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, dimana jumlah pengakuan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor lebih besar dibandingkan jumlah beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian nilai persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2021.
2. Terdapat perbedaan sebesar Rp51.250,00 antara belanja dan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, dimana jumlah pengakuan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak lebih besar dibandingkan jumlah beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian nilai persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2021.
3. Terdapat perbedaan sebesar Rp76.250,00 antara belanja dan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor, dimana jumlah pengakuan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor lebih besar dibandingkan jumlah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian nilai persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2021.
4. Terdapat perbedaan sebesar Rp32.015.530,00 antara belanja dan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian nilai persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2021 berupa persediaan peralatan dan bahan pembersih.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2.1.3 Beban Lain-lain	3.000.000,00	0,00

Beban Lain-lain Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp3.000.000,00. Nilai beban lain-lain tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000,00 bila dibandingkan dengan nilai beban Lain-lain tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp0,00 atau bernilai nihil. Beban Lain-lain tahun 2021 tersebut merupakan aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak

memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2.1.4 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	467.328.930,00	497.164.852,00

Beban penyusutan peralatan dan mesin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp467.328.930,00. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp29.835.922,00 dibandingkan dengan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp497.164.852,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2.1.5 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	141.082.720,00	141.206.584,00

Beban penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp141.082.720,00. Nilai beban penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp123.864,00 dibandingkan dengan nilai beban penyusutan Gedung dan Bangunan 2020 sebesar Rp141.206.584,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2.1.6 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.006.000,00	0,00

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp2.720.240,00. nilai beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2.1.7 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.720.240,00	2.720.240,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp2.720.240,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp2.720.240,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.2.1.8 Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.138.635,00	0,00

Beban Penyusutan Aset Lainnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp5.138.635,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan nilai beban Penyusutan Aset Lainnya tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp0,00 atau bernilai nihil.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(10.460.667.041,00)	(7.154.135.297,00)

Surplus/(Defisit)–LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban-LO. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 mengalami Defisit-LO sebesar Rp10.466.479.843,00. Artinya, terdapat peningkatan nilai defisit sebesar Rp3.306.531.744,00 atau 46,22 persen bila dibandingkan dengan nilai deficit-LO tahun 2020 yaitu sebesar Rp7.154.135.297,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	16.470.582.370,00	16.257.901.616,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasi, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2021.

Jumlah ekuitas akhir Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp16.470.582.370,00. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2021 (saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020) dikurangi defisit - LO Tahun 2021 lalu ditambahkan dengan koreksi rekuitas lainnya

serta ekuitas untuk dikonsolidasikan. Jumlah ekuitas akhir 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp212.680.754,00 bila dibandingkan dengan nilai ekuitas akhir Tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp16.257.901.616,00. Berikut perincian laporan perubahan ekuitas tahun 2021 :

Tabel 5.20
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Awal	16.257.901.616,00	9.065.493.989,00
Surplus/Defisit-LO	(10.460.667.041,00)	(7.154.135.297,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	27.312.549,00	7.669.523.053,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	10.646.035.246,00	6.677.019.871,00
Ekuitas Akhir	116.440.229.954,00	16.257.901.616,00

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	16.257.901.616,00	9.065.493.989,00

Ekuitas awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 berasal dari ekuitas akhir per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp16.257.901.616,00.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	(10.460.667.041,00)	(7.154.135.297,00)

Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban-LO. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 mengalami defisit-LO sebesar Rp10.460.667.041,00. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	27.312.549,00	7.669.523.053,00

Nilai koreksi ekuitas lainnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 disajikan sebesar Rp27.312.549,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.642.210.504,00 atau 99,96 persen bila dibandingkan dengan nilai koreksi ekuitas lainnya tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp7.669.523.053,00. Koreksi Ekuitas Lainnya mengalami perubahan disebabkan adanya mutasi bertambah, yaitu koreksi mutasi antar SKPD sebesar

Rp150.300.000,00, Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat sebesar Rp71.009.579,00, dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp24.539.614,00, dikurangi mutasi berkurang dan Akumulasi, yaitu Koreksi atas penghapusan barang rusak berat sebesar Rp194.739.144,00 dan Koreksi beban penyusutan jalan dan jembatan sebesar Rp23.797.500,00. Berikut disajikan rincian koreksi ekuitas lainnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021

Tabel 5.21
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi Bertambah	
Koreksi Menambah Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2021 (Mutasi Antar SKPD)	150.300.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	71.009.579,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	24.539.614,00
Jumlah Koreksi Bertambah	245.849.193,00
Koreksi Berkurang	
Koreksi atas penghapusan/penghentian pemakaian barang rusak berat	194.739.144,00
Koreksi Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 2021	23.797.500,00
Jumlah Koreksi Berkurang	218.536.644,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	27.312.549,00

	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	10.646.035.246,00	6.677.019.871,00

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara organisasi perangkat daerah dan PPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan tahun 2021 sebesar Rp10.646.035.246,00. Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.969.015.375,00 bila dibandingkan dengan nilai ekuitas untuk dikonsolidasikan yang disajikan di tahun 2020 sebesar Rp10.646.035.246,00.

BAB VI
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 diantaranya :

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (10.646.035.246,00)$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(10.646.035.246,00)
Total Pendapatan	=	0,00
Total Belanja	=	(10.646.035.246,00)
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan SiLPA tahun berjalan yang terdapat pada LRA tahun 2021.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 16.440.229.954,00$$

Aset	=	16.440.229.954,00
Total Kewajiban	=	0,00
Total Ekuitas	=	16.440.229.954,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2021.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang
Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara
Pengeluaran = **0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2021.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total
Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non
Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa
(LO) = **(10.466.479.843,00)**

Surplus/Defisit LO	=	(10.466.479.843,00)
Total Pendapatan (LO)	=	0,00
Total Beban (LO)	=	(10.466.479.843,00)

Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2021.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 16.470.582.370,00$$

Ekuitas Akhir	=	16.470.582.370,00
Ekuitas Awal	=	16.257.901.616,00
Surlus (Defisit) LO	=	(10.460.667.041,00)
Koreksi Ekuitas	=	27.312.549,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	10.646.035.246,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021.

6.2 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horisontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 diantaranya:

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2021.

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	767.577.600,00
Belanja Modal	=	767.577.600,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	18.841.089.554,00
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	17.956.964.454,00
Selisih		116.547.500,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih lebih penambahan aset tetap pada Neraca tahun 2021 sebesar Rp116.547.500,00, selisih tersebut bertambah ataupun berkurang pada aset tetap tersebut telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada bab sebelumnya.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya		16.257.901.616,00
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	16.257.901.616,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	16.257.901.616,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara

Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2020.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE **(10.466.479.843,00)**

Surplus/Defisit pada LO = **(10.466.479.843,00)**

Surplus/Defisit pada LPE = (10.466.479.843,00)

Selisih **0,00**

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2021 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Persediaan (LO)

Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan, ditambah Persediaan Awal Tahun, dikurangi Persediaan Akhir Tahun.

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun **1.500.675.846,00**

Beban Persediaan (LO) = **1.500.675.846,00**

Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan = 1.540.742.976,00

Persediaan Awal Tahun = 916.250,00

Persediaan Akhir Tahun = 40.983.380,00

Selisih **0,00**

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Beban Persediaan (LO) tahun 2021 dengan Belanja Barang dan Jasa untuk Persediaan, ditambah Persediaan Awal Tahun, dikurangi Persediaan Akhir Tahun 2021.

2. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	614.137.890,00
- Akum. Penyusutan Awal Tahun		
Beban Penyusutan (LO)	=	613.395.776,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	2.455.810.587,00
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	1.842.414.811,00
Selisih		742.114,00

Penjelasan

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui terjadi selisih antara Beban Penyusutan (LO) dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2021 sebesar Rp742.114,00

BAB VII

PENUTUP

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2021 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 31 Januari 2022

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dra. Sitti Hasbia N. Zaenong, M.Si

NIP. 19650824 199103 2 006

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor :
 Tanggal : 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	10.880.116.653,00	10.646.035.246,00	(234.081.407,00)	97,85	
5 . 1	BELANJA OPERASI	5.967.784.712,00	5.807.983.979,00	(159.800.733,00)	97,32	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	5.967.784.712,00	5.807.983.979,00	(159.800.733,00)	97,32	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.112.680.203,00	3.079.913.700,00	(32.766.503,00)	98,95	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	3.112.680.203,00	3.079.913.700,00	(32.766.503,00)	98,95	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	274.451.547,00	266.203.362,00	(8.248.185,00)	96,99	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	274.451.547,00	266.203.362,00	(8.248.185,00)	96,99	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.108.900,00	134.600.000,00	(9.508.900,00)	93,40	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	144.108.900,00	134.600.000,00	(9.508.900,00)	93,40	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	146.627.800,00	139.670.000,00	(6.957.800,00)	95,25	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	146.627.800,00	139.670.000,00	(6.957.800,00)	95,25	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	211.671.871,00	174.170.100,00	(37.501.771,00)	82,28	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01	Belanja Tunjangan Beras PNS	211.671.871,00	174.170.100,00	(37.501.771,00)	82,28	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.125.243,00	3.652.969,00	(472.274,00)	88,55	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.125.243,00	3.652.969,00	(472.274,00)	88,55	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	137.616,00	39.218,00	(98.398,00)	28,50	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 08 . 01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	137.616,00	39.218,00	(98.398,00)	28,50	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.952.181.532,00	1.889.974.630,00	(62.206.902,00)	96,81	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 13 . 01	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.952.181.532,00	1.889.974.630,00	(62.206.902,00)	96,81	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24	Belanja Honorarium	109.800.000,00	107.760.000,00	(2.040.000,00)	98,14	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	105.720.000,00	105.720.000,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 24 . 02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	2.040.000,00	(2.040.000,00)	50,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 25	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 25 . 02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2	BELANJA OPERASI	4.912.331.941,00	4.838.051.267,00	(74.280.674,00)	98,49	
5.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.534.950,00	180.301.050,00	(18.233.900,00)	90,82	
5.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.102.550,00	49.373.550,00	(2.729.000,00)	94,76	
5.2.01.01.1	Belanja Barang dan Jasa	52.102.550,00	49.373.550,00	(2.729.000,00)	94,76	
5.2.01.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.352.550,00	19.623.550,00	(2.729.000,00)	87,79	
5.2.01.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.744.550,00	7.015.550,00	(2.729.000,00)	71,99	
5.2.01.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.275.000,00	11.275.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.206.775,00	24.206.775,00	0,00	100,00	
5.2.01.02.1	Belanja Barang dan Jasa	24.206.775,00	24.206.775,00	0,00	100,00	
5.2.01.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.206.775,00	24.206.775,00	0,00	100,00	
5.2.01.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.129.250,00	1.129.250,00	0,00	100,00	
5.2.01.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.527.525,00	2.527.525,00	0,00	100,00	
5.2.01.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.665.350,00	11.665.350,00	0,00	100,00	
5.2.01.04.1	Belanja Barang dan Jasa	11.665.350,00	11.665.350,00	0,00	100,00	
5.2.01.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.665.350,00	11.665.350,00	0,00	100,00	
5.2.01.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.189.250,00	1.189.250,00	0,00	100,00	
5.2.01.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.351.100,00	6.351.100,00	0,00	100,00	
5.2.01.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110.560.275,00	95.055.375,00	(15.504.900,00)	85,98	
5.2.01.06.1	Belanja Barang dan Jasa	110.560.275,00	95.055.375,00	(15.504.900,00)	85,98	
5.2.01.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.028.275,00	4.028.275,00	0,00	100,00	
5.2.01.06.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.06.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	1.078.275,00	1.078.275,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Cetak					
5.2.01.06.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.06.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.06.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.06.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.06.1.07.38	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.06.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.532.000,00	91.027.100,00	(15.504.900,00)	85,45	
5.2.01.06.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.352.000,00	72.847.100,00	(15.504.900,00)	82,45	
5.2.01.06.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.180.000,00	18.180.000,00	0,00	100,00	
5.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	615.965.125,00	604.715.125,00	(11.250.000,00)	98,17	
5.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	548.709.625,00	537.759.625,00	(10.950.000,00)	98,00	
5.2.02.02.1	Belanja Barang dan Jasa	548.709.625,00	537.759.625,00	(10.950.000,00)	98,00	
5.2.02.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.339.625,00	2.339.625,00	0,00	100,00	
5.2.02.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	689.625,00	689.625,00	0,00	100,00	
5.2.02.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	546.370.000,00	535.420.000,00	(10.950.000,00)	98,00	
5.2.02.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.250.000,00	5.800.000,00	(450.000,00)	92,80	
5.2.02.02.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.02.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	481.200.000,00	472.200.000,00	(9.000.000,00)	98,13	
5.2.02.02.1.04.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000,00	34.500.000,00	(1.500.000,00)	95,83	
5.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.200.000,00	36.900.000,00	(300.000,00)	99,19	
5.2.02.04.1	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	36.900.000,00	(300.000,00)	99,19	
5.2.02.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.300.000,00	(300.000,00)	99,02	
5.2.02.04.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.600.000,00	30.300.000,00	(300.000,00)	99,02	
5.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.055.500,00	30.055.500,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1	Belanja Barang dan Jasa	30.055.500,00	30.055.500,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.205.500,00	16.205.500,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	1.430.500,00	1.430.500,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.05.1.01.26	Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.025.000,00	12.025.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.344.500,00	175.374.500,00	(4.970.000,00)	97,24	
5.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.250.000,00	76.800.000,00	(450.000,00)	99,42	
5.2.05.02.1	Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	76.800.000,00	(450.000,00)	99,42	
5.2.05.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	77.250.000,00	76.800.000,00	(450.000,00)	99,42	
5.2.05.02.1.01.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	47.250.000,00	46.800.000,00	(450.000,00)	99,05	
5.2.05.02.1.01.76	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103.094.500,00	98.574.500,00	(4.520.000,00)	95,62	
5.2.05.11.1	Belanja Barang dan Jasa	103.094.500,00	98.574.500,00	(4.520.000,00)	95,62	
5.2.05.11.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.394.500,00	24.394.500,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.557.000,00	5.557.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.262.500,00	4.262.500,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.575.000,00	14.575.000,00	0,00	100,00	
5.2.05.11.1.04	Belanja Jasa Kantor	68.950.000,00	65.180.000,00	(3.770.000,00)	94,53	
5.2.05.11.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68.950.000,00	65.180.000,00	(3.770.000,00)	94,53	
5.2.05.11.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.750.000,00	9.000.000,00	(750.000,00)	92,31	
5.2.05.11.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.750.000,00	9.000.000,00	(750.000,00)	92,31	
5.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.055.917.616,00	1.043.221.100,00	(12.696.516,00)	98,80	
5.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	636.538.566,00	636.050.100,00	(488.466,00)	99,92	
5.2.06.02.1	Belanja Barang dan Jasa	74.434.426,00	74.206.000,00	(228.426,00)	99,69	
5.2.06.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	74.434.426,00	74.206.000,00	(228.426,00)	99,69	
5.2.06.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	69.419.426,00	69.191.000,00	(228.426,00)	99,67	
5.2.06.02.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	954.000,00	890.000,00	(64.000,00)	93,29	
5.2.08.01.1	Belanja Barang dan Jasa	954.000,00	890.000,00	(64.000,00)	93,29	
5.2.08.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	954.000,00	890.000,00	(64.000,00)	93,29	
5.2.08.01.1.04.64	Belanja Paket/Pengiriman	954.000,00	890.000,00	(64.000,00)	93,29	
5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.878.824,00	129.903.987,00	(2.974.837,00)	97,76	
5.2.08.02.1	Belanja Barang dan Jasa	132.878.824,00	129.903.987,00	(2.974.837,00)	97,76	
5.2.08.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	112.878.824,00	109.903.987,00	(2.974.837,00)	97,36	
5.2.08.02.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	92.878.824,00	89.903.987,00	(2.974.837,00)	96,80	
5.2.08.02.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.02.1.20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.02.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.409.276,00	198.428.026,00	(981.250,00)	99,51	
5.2.08.04.1	Belanja Barang dan Jasa	199.409.276,00	198.428.026,00	(981.250,00)	99,51	
5.2.08.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	185.454.276,00	184.478.026,00	(976.250,00)	99,47	
5.2.08.04.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.978.390,00	14.978.390,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	52.168.150,00	52.091.900,00	(76.250,00)	99,85	
5.2.08.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.380.000,00	1.480.000,00	(900.000,00)	62,18	
5.2.08.04.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	26.316.936,00	26.316.936,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	17.870.800,00	17.870.800,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.420.000,00	37.420.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.08.04.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.355.000,00	4.350.000,00	(5.000,00)	99,89	
5.2.08.04.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.355.000,00	4.350.000,00	(5.000,00)	99,89	
5.2.08.04.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.08.04.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	310.940.000,00	310.922.604,00	(17.396,00)	99,99	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.09.02	Pemerintahan Daerah <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	267.500.000,00	267.482.604,00	(17.396,00)	99,99	
5.2.09.02.1	Belanja Barang dan Jasa	267.500.000,00	267.482.604,00	(17.396,00)	99,99	
5.2.09.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.02.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.500.000,00	92.482.604,00	(17.396,00)	99,98	
5.2.09.02.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	92.500.000,00	92.482.604,00	(17.396,00)	99,98	
5.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.440.000,00	43.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1	Belanja Barang dan Jasa	43.440.000,00	43.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.440.000,00	43.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.19.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.330.000,00	15.330.000,00	0,00	100,00	
5.2.09.06.1.19.11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00	
5.2.15	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	221.991.200,00	219.716.200,00	(2.275.000,00)	98,98	
5.2.15.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	161.271.500,00	158.996.500,00	(2.275.000,00)	98,59	
5.2.15.02.1	Belanja Barang dan Jasa	161.271.500,00	158.996.500,00	(2.275.000,00)	98,59	
5.2.15.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.269.250,00	30.244.250,00	(25.000,00)	99,92	
5.2.15.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.853.250,00	20.828.250,00	(25.000,00)	99,88	
5.2.15.02.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	286.000,00	286.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.02.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.312.250,00	2.312.250,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.15.02	Belanja Sosialisasi	2.312.250,00	2.312.250,00	0,00	100,00	
5.2.15.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.290.000,00	106.040.000,00	(2.250.000,00)	97,92	
5.2.15.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.590.000,00	100.340.000,00	(2.250.000,00)	97,81	
5.2.15.02.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.02.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	60.719.700,00	60.719.700,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1	Belanja Barang dan Jasa	60.719.700,00	60.719.700,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.11.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.11.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.11.1.07.17	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.11.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.459.700,00	3.459.700,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1.15.02	Belanja Sosialisasi	3.459.700,00	3.459.700,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.11.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.15.11.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	100,00	
5.2.16	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	202.641.500,00	194.118.700,00	(8.522.800,00)	95,79	
5.2.16.06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	202.641.500,00	194.118.700,00	(8.522.800,00)	95,79	
5.2.16.06.1	Belanja Barang dan Jasa	202.641.500,00	194.118.700,00	(8.522.800,00)	95,79	
5.2.16.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	39.785.500,00	39.785.500,00	0,00	100,00	
5.2.16.06.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.708.000,00	3.708.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.713.500,00	17.713.500,00	0,00	100,00	
5.2.16.06.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	704.000,00	704.000,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.660.000,00	17.660.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	39.570.000,00	37.970.000,00	(1.600.000,00)	95,96	
5.2.16.06.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.050.000,00	23.450.000,00	(1.600.000,00)	93,61	
5.2.16.06.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.06.1.04.08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.06.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.06.1.07.10	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.16.06.1.08	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.06.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.06.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.786.000,00	113.863.200,00	(6.922.800,00)	94,27	
5.2.16.06.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.476.000,00	82.553.200,00	(6.922.800,00)	92,26	
5.2.16.06.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
5.2.16.06.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.760.000,00	26.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.18	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	273.362.425,00	268.982.450,00	(4.379.975,00)	98,40	
5.2.18.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	75.025.900,00	73.545.925,00	(1.479.975,00)	98,03	
5.2.18.02.1	Belanja Barang dan Jasa	75.025.900,00	73.545.925,00	(1.479.975,00)	98,03	
5.2.18.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.100.000,00	(400.000,00)	95,79	
5.2.18.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.500.000,00	9.100.000,00	(400.000,00)	95,79	
5.2.18.02.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.985.900,00	5.955.925,00	(29.975,00)	99,50	
5.2.18.02.1.15.02	Belanja Sosialisasi	5.985.900,00	5.955.925,00	(29.975,00)	99,50	
5.2.18.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.940.000,00	40.890.000,00	(1.050.000,00)	97,50	
5.2.18.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.140.000,00	37.090.000,00	(1.050.000,00)	97,25	
5.2.18.02.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.18.05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBP	198.336.525,00	195.436.525,00	(2.900.000,00)	98,54	
5.2.18.05.1	Belanja Barang dan Jasa	198.336.525,00	195.436.525,00	(2.900.000,00)	98,54	
5.2.18.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.05.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.05.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.18.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.05.1.01.61	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.05.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.18.05.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.456.525,00	10.456.525,00	0,00	100,00	
5.2.18.05.1.15.02	Belanja Sosialisasi	10.456.525,00	10.456.525,00	0,00	100,00	
5.2.18.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.580.000,00	52.680.000,00	(2.900.000,00)	94,78	
5.2.18.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.280.000,00	39.380.000,00	(2.900.000,00)	93,14	
5.2.18.05.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.19	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	239.597.200,00	237.027.200,00	(2.570.000,00)	98,93	
5.2.19.01	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	99.999.925,00	99.499.925,00	(500.000,00)	99,50	
5.2.19.01.1	Belanja Barang dan Jasa	99.999.925,00	99.499.925,00	(500.000,00)	99,50	
5.2.19.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.845.000,00	36.845.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	43.212.000,00	43.212.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	35.112.000,00	35.112.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	4.907.925,00	4.907.925,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	serta Pendidikan dan Pelatihan					
5.2.19.01.1.15.02	Belanja Sosialisasi	4.907.925,00	4.907.925,00	0,00	100,00	
5.2.19.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.035.000,00	14.535.000,00	(500.000,00)	96,67	
5.2.19.01.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.710.000,00	11.210.000,00	(500.000,00)	95,73	
5.2.19.01.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	57.109.875,00	56.089.875,00	(1.020.000,00)	98,21	
5.2.19.02.1	Belanja Barang dan Jasa	57.109.875,00	56.089.875,00	(1.020.000,00)	98,21	
5.2.19.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.059.875,00	39.039.875,00	(1.020.000,00)	97,45	
5.2.19.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.234.175,00	4.234.175,00	0,00	100,00	
5.2.19.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.300.700,00	26.280.700,00	(1.020.000,00)	96,26	
5.2.19.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.02.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.19.02.1.15.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.19.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.02.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.19.02.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	82.487.400,00	81.437.400,00	(1.050.000,00)	98,73	
5.2.19.03.1	Belanja Barang dan Jasa	82.487.400,00	81.437.400,00	(1.050.000,00)	98,73	
5.2.19.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.160.000,00	37.160.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.03.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.03.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.19.03.1.04	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00	15.500.000,00	(900.000,00)	94,51	
5.2.19.03.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.400.000,00	15.500.000,00	(900.000,00)	94,51	
5.2.19.03.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.137.400,00	9.137.400,00	0,00	100,00	
5.2.19.03.1.15.02	Belanja Sosialisasi	9.137.400,00	9.137.400,00	0,00	100,00	
5.2.19.03.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.790.000,00	19.640.000,00	(150.000,00)	99,24	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.19.03.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.090.000,00	13.940.000,00	(150.000,00)	98,94	
5.2.19.03.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.20	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.163.551.475,00	1.160.306.475,00	(3.245.000,00)	99,72	
5.2.20.01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	41.710.725,00	41.710.725,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1	Belanja Barang dan Jasa	41.710.725,00	41.710.725,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.860.725,00	3.860.725,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	932.750,00	932.750,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.277.975,00	1.277.975,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.04.71	Belanja Lembur	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.02	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.02.1	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.02.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.02.1.04.46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.03.1	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.03.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.03.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	12.435.750,00	12.435.750,00	0,00	100,00	
5.2.20.04.1	Belanja Barang dan Jasa	12.435.750,00	12.435.750,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.20.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.535.750,00	5.535.750,00	0,00	100,00	
5.2.20.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	475.750,00	475.750,00	0,00	100,00	
5.2.20.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.04.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.05.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.05.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.05.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.05.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.05.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.05.1.15.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.05.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	35.283.850,00	35.283.850,00	0,00	100,00	
5.2.20.06.1	Belanja Barang dan Jasa	35.283.850,00	35.283.850,00	0,00	100,00	
5.2.20.06.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.873.850,00	20.873.850,00	0,00	100,00	
5.2.20.06.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.713.500,00	1.713.500,00	0,00	100,00	
5.2.20.06.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	908.350,00	908.350,00	0,00	100,00	
5.2.20.06.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.252.000,00	18.252.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.06.1.04	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.06.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.06.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.06.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.20.07	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	942.000.000,00	941.355.000,00	(645.000,00)	99,93	
5.2.20.07.1	Belanja Barang dan Jasa	942.000.000,00	941.355.000,00	(645.000,00)	99,93	
5.2.20.07.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	822.000.000,00	821.420.000,00	(580.000,00)	99,93	
5.2.20.07.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	783.250.000,00	782.670.000,00	(580.000,00)	99,93	
5.2.20.07.1.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.07.1.04	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	119.935.000,00	(65.000,00)	99,95	
5.2.20.07.1.04.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	120.000.000,00	119.935.000,00	(65.000,00)	99,95	
5.2.20.08	Fasilitas Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	13.188.525,00	10.588.525,00	(2.600.000,00)	80,29	
5.2.20.08.1	Belanja Barang dan Jasa	13.188.525,00	10.588.525,00	(2.600.000,00)	80,29	
5.2.20.08.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	228.525,00	228.525,00	0,00	100,00	
5.2.20.08.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	228.525,00	228.525,00	0,00	100,00	
5.2.20.08.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.960.000,00	10.360.000,00	(2.600.000,00)	79,94	
5.2.20.08.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.960.000,00	10.360.000,00	(2.600.000,00)	79,94	
5.2.20.09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	14.376.175,00	14.376.175,00	0,00	100,00	
5.2.20.09.1	Belanja Barang dan Jasa	14.376.175,00	14.376.175,00	0,00	100,00	
5.2.20.09.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.826.175,00	5.826.175,00	0,00	100,00	
5.2.20.09.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	626.750,00	626.750,00	0,00	100,00	
5.2.20.09.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	549.425,00	549.425,00	0,00	100,00	
5.2.20.09.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.09.1.04	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.09.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.09.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.09.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.10.1	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.10.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.10.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.20.11	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	4.793.725,00	4.793.725,00	0,00	100,00	
5.2.20.11.1	Belanja Barang dan Jasa	4.793.725,00	4.793.725,00	0,00	100,00	
5.2.20.11.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.793.725,00	4.793.725,00	0,00	100,00	
5.2.20.11.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.793.725,00	4.793.725,00	0,00	100,00	
5.2.20.12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	14.180.125,00	14.180.125,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1	Belanja Barang dan Jasa	14.180.125,00	14.180.125,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.12.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1.04	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	710.125,00	710.125,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1.15.02	Belanja Sosialisasi	710.125,00	710.125,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.545.000,00	5.545.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.12.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.13.1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.13.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.13.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.20.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	33.222.600,00	33.222.600,00	0,00	100,00	
5.2.20.14.1	Belanja Barang dan Jasa	33.222.600,00	33.222.600,00	0,00	100,00	
5.2.20.14.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.972.600,00	9.972.600,00	0,00	100,00	
5.2.20.14.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	764.750,00	764.750,00	0,00	100,00	
5.2.20.14.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	682.850,00	682.850,00	0,00	100,00	
5.2.20.14.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.14.1.04	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.14.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.20.14.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	100,00	
5.2.20.14.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	100,00	
5.2.21	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	116.243.850,00	114.143.850,00	(2.100.000,00)	98,19	
5.2.21.01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	35.250.000,00	34.800.000,00	(450.000,00)	98,72	
5.2.21.01.1	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	34.800.000,00	(450.000,00)	98,72	
5.2.21.01.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.01.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.01.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.01.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.01.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.01.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.01.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.250.000,00	34.800.000,00	(450.000,00)	98,72	
5.2.21.01.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.250.000,00	34.800.000,00	(450.000,00)	98,72	
5.2.21.02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	19.570.000,00	18.420.000,00	(1.150.000,00)	94,12	
5.2.21.02.1	Belanja Barang dan Jasa	19.570.000,00	18.420.000,00	(1.150.000,00)	94,12	
5.2.21.02.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.02.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.02.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.02.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.02.1.04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.02.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.02.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.570.000,00	18.420.000,00	(1.150.000,00)	94,12	
5.2.21.02.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.620.000,00	11.570.000,00	(1.050.000,00)	91,68	
5.2.21.02.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.950.000,00	6.850.000,00	(100.000,00)	98,56	
5.2.21.03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	27.199.950,00	26.699.950,00	(500.000,00)	98,16	
5.2.21.03.1	Belanja Barang dan Jasa	27.199.950,00	26.699.950,00	(500.000,00)	98,16	



Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 . 08
Unit Organisasi : 2 . 08 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 04	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	4.200.000,00	(500.000,00)	89,36	
5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 04 . 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.700.000,00	4.200.000,00	(500.000,00)	89,36	
5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.659.950,00	1.659.950,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 15 . 02	Belanja Sosialisasi	1.659.950,00	1.659.950,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.190.000,00	16.190.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 23 . 04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.190.000,00	16.190.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 21 . 04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi	27.753.900,00	27.753.900,00	0,00	100,00	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor :
Tanggal : 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan P					
5.2.21.04.1	Belanja Barang dan Jasa	27.753.900,00	27.753.900,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.553.900,00	19.553.900,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	914.400,00	914.400,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.04	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.04.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.05	Fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.05.1	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.05.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.05.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.21.05.1.23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.05.1.23.02	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.880.116.653,00)	(10.646.035.246,00)	234.081.407,00	97,85	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08
Unit Organisasi : 2.08 . 2.08.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		TOTAL	LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI		
5	BELANJA DAERAH	10.880.116.653,00	0,00	10.646.035.246,00	10.646.035.246,00	(234.081.407,00)
5.1	BELANJA OPERASI	10.109.570.963,00	0,00	9.878.457.646,00	9.878.457.646,00	(231.113.317,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	5.967.784.712,00	0,00	5.807.983.979,00	5.807.983.979,00	(159.800.733,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.893.803.180,00	0,00	3.798.249.349,00	3.798.249.349,00	(95.553.831,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.112.680.203,00	0,00	3.079.913.700,00	3.079.913.700,00	(32.766.503,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.112.680.203,00	0,00	3.079.913.700,00	3.079.913.700,00	(32.766.503,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	274.451.547,00	0,00	266.203.362,00	266.203.362,00	(8.248.185,00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	274.451.547,00	0,00	266.203.362,00	266.203.362,00	(8.248.185,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.108.900,00	0,00	134.600.000,00	134.600.000,00	(9.508.900,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	144.108.900,00	0,00	134.600.000,00	134.600.000,00	(9.508.900,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	146.627.800,00	0,00	139.670.000,00	139.670.000,00	(6.957.800,00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	146.627.800,00	0,00	139.670.000,00	139.670.000,00	(6.957.800,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	211.671.871,00	0,00	174.170.100,00	174.170.100,00	(37.501.771,00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	211.671.871,00	0,00	174.170.100,00	174.170.100,00	(37.501.771,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.125.243,00	0,00	3.652.969,00	3.652.969,00	(472.274,00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.125.243,00	0,00	3.652.969,00	3.652.969,00	(472.274,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	137.616,00	0,00	39.218,00	39.218,00	(98.398,00)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	137.616,00	0,00	39.218,00	39.218,00	(98.398,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.952.181.532,00	0,00	1.889.974.630,00	1.889.974.630,00	(62.206.902,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.952.181.532,00	0,00	1.889.974.630,00	1.889.974.630,00	(62.206.902,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.952.181.532,00	0,00	1.889.974.630,00	1.889.974.630,00	(62.206.902,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	121.800.000,00	0,00	119.760.000,00	119.760.000,00	(2.040.000,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	109.800.000,00	0,00	107.760.000,00	107.760.000,00	(2.040.000,00)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	105.720.000,00	0,00	105.720.000,00	105.720.000,00	0,00
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	(2.040.000,00)
5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.141.786.251,00	0,00	4.070.473.667,00	4.070.473.667,00	(71.312.584,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	1.849.928.652,00	0,00	1.842.319.976,00	1.842.319.976,00	(7.608.676,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.849.928.652,00	0,00	1.842.319.976,00	1.842.319.976,00	(7.608.676,00)
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	93.127.816,00	0,00	92.899.390,00	92.899.390,00	(228.426,00)
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	83.843.575,00	0,00	83.767.325,00	83.767.325,00	(76.250,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.005.299.525,00	0,00	998.445.525,00	998.445.525,00	(6.854.000,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	30.141.936,00	0,00	30.141.936,00	30.141.936,00	0,00
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	24.788.800,00	0,00	24.788.800,00	24.788.800,00	0,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	269.897.000,00	0,00	269.897.000,00	269.897.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.680.000,00	0,00	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08
Unit Organisasi : 2.08 . 2.08.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	47.250.000,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	(450.000,00)
5.1.2.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	38.750.000,00	0,00	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	1.273.219.599,00	0,00	1.251.660.787,00	1.251.660.787,00	(21.558.812,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.220.234.824,00	0,00	1.198.710.987,00	1.198.710.987,00	(21.523.837,00)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	242.250.000,00	0,00	234.630.000,00	234.630.000,00	(7.620.000,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.360.000,00	0,00	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	481.200.000,00	0,00	472.200.000,00	472.200.000,00	(9.000.000,00)
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	62.200.000,00	0,00	61.900.000,00	61.900.000,00	(300.000,00)
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.000.000,00	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	(1.500.000,00)
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	155.112.000,00	0,00	155.047.000,00	155.047.000,00	(65.000,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	92.878.824,00	0,00	89.903.987,00	89.903.987,00	(2.974.837,00)
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	954.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	(64.000,00)
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.355.000,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	(5.000,00)
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.355.000,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	(5.000,00)
5.1.2.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	38.629.775,00	0,00	38.599.800,00	38.599.800,00	(29.975,00)
5.1.2.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	38.629.775,00	0,00	38.599.800,00	38.599.800,00	(29.975,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	155.940.000,00	0,00	155.922.604,00	155.922.604,00	(17.396,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.940.000,00	0,00	135.922.604,00	135.922.604,00	(17.396,00)
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	92.500.000,00	0,00	92.482.604,00	92.482.604,00	(17.396,00)
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.760.000,00	0,00	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.330.000,00	0,00	15.330.000,00	15.330.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08
Unit Organisasi : 2.08 . 2.08.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			TOTAL	LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI			
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	862.698.000,00	0,00	820.570.300,00	820.570.300,00	(42.127.700,00)	
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	862.698.000,00	0,00	820.570.300,00	820.570.300,00	(42.127.700,00)	
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	606.348.000,00	0,00	567.370.300,00	567.370.300,00	(38.977.700,00)	
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	119.585.000,00	0,00	116.435.000,00	116.435.000,00	(3.150.000,00)	
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	130.295.000,00	0,00	130.295.000,00	130.295.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	770.545.690,00	0,00	767.577.600,00	767.577.600,00	(2.968.090,00)	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.441.550,00	0,00	205.733.500,00	205.733.500,00	(2.708.050,00)	
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	158.566.400,00	0,00	158.133.500,00	158.133.500,00	(432.900,00)	
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	37.406.400,00	0,00	37.263.500,00	37.263.500,00	(142.900,00)	
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	37.406.400,00	0,00	37.263.500,00	37.263.500,00	(142.900,00)	
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	121.160.000,00	0,00	120.870.000,00	120.870.000,00	(290.000,00)	
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	97.807.500,00	0,00	97.525.000,00	97.525.000,00	(282.500,00)	
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.165.000,00	0,00	8.165.000,00	8.165.000,00	0,00	
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.2.2.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.187.500,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	(7.500,00)	
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.125.150,00	0,00	0,00	0,00	(2.125.150,00)	
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.125.150,00	0,00	0,00	0,00	(2.125.150,00)	
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.125.150,00	0,00	0,00	0,00	(2.125.150,00)	
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	47.750.000,00	0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	(150.000,00)	
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	35.937.500,00	0,00	35.800.000,00	35.800.000,00	(137.500,00)	
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	35.937.500,00	0,00	35.800.000,00	35.800.000,00	(137.500,00)	
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.812.500,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	(12.500,00)	
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.812.500,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	(12.500,00)	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	562.104.140,00	0,00	561.844.100,00	561.844.100,00	(260.040,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	562.104.140,00	0,00	561.844.100,00	561.844.100,00	(260.040,00)	
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	562.104.140,00	0,00	561.844.100,00	561.844.100,00	(260.040,00)	
5.2.3.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	162.104.140,00	0,00	162.104.100,00	162.104.100,00	(40,00)	
5.2.3.01.01.0036	Belanja Modal Taman	400.000.000,00	0,00	399.740.000,00	399.740.000,00	(260.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(10.880.116.653,00)	0,00	(10.646.035.246,00)	(10.646.035.246,00)	234.081.407,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.880.116.653,00)	0,00	(10.646.035.246,00)	(10.646.035.246,00)	234.081.407,00	



NERACA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 08

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi : 2 . 08 . 01

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	40.983.380,00	916.250,00
JUMLAH ASET LANCAR	40.983.380,00	916.250,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	7.660.900.000,00	7.660.900.000,00
Peralatan dan Mesin	3.271.704.233,00	3.084.198.233,00
Gedung dan Bangunan	7.622.173.321,00	7.060.329.221,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.300.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	136.012.000,00	151.537.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.455.810.587,00)	(1.842.414.811,00)
JUMLAH ASET TETAP	16.385.278.967,00	16.114.549.643,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00



NERACA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 08

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Organisasi : 2 . 08 . 01

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2021	2020
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	126.080.100,00	142.435.723,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(81.760.077,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	44.320.023,00	142.435.723,00
JUMLAH ASET	16.470.582.370,00	16.257.901.616,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	16.470.582.370,00	16.257.901.616,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16.470.582.370,00	16.257.901.616,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	10.460.667.041,00	7.154.135.297,00	3.306.531.744,00	46,22
8.1.1	Beban Pegawai	5.807.983.979,00	5.228.131.340,00	579.852.639,00	11,09
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	4.030.406.537,00	1.284.912.281,00	2.745.494.256,00	213,67
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	467.328.930,00	497.164.852,00	(29.835.922,00)	(6,00)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	141.082.720,00	141.206.584,00	(123.864,00)	(0,09)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.720.240,00	2.720.240,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.138.635,00	0,00	5.138.635,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	16.257.901.616,00	9.065.493.989,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.460.667.041,00)	(7.154.135.297,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	27.312.549,00	7.669.523.053,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.646.035.246,00	6.677.019.871,00
EKUITAS AKHIR	16.470.582.370,00	16.257.901.616,00

Palu, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROV. SULTENG**

Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M.Si

NIP. 19650824 199103 2 006